



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Maret 2016

Halaman: 10

Pendataan KMS Libatkan PKK

UMBULHARJO-- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta akan melibatkan tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah untuk turut mengawasi pendataan penduduk calon penerima kartu menuju sejahtera.

"Pada tahun ini, kami melibatkan tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pendataan calon penerima kartu menuju sejahtera (KMS). Harapannya, hasil pendataan lebih valid," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Tri Maryatun di Balaikota Timoho, Jogja, Senin (28/3).

penerima KMS namun belum ada pihak yang mengusulkan, PKK bisa menyampaikannya ke wilayah.

Begitu pula, saat verifikasi lapangan dilakukan oleh petugas, Tim Penggerak PKK juga bisa ikut mengawasi. "Siapa tahu, ada petugas pendataan yang kurang teliti saat mendata," katanya.

Tri Maryatun menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan kepada seluruh pihak, termasuk petugas pendata, bahwa pendataan dan verifikasi calon penerima KMS diawasi oleh tim penggerak PKK.

Selain memantau pendataan dan verifikasi, Tim Penggerak PKK juga diharapkan

Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial, disebutkan bahwa elemen masyarakat yang terlibat adalah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

"Namun, biasanya istri RW atau RT adalah ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah tersebut. Harapannya, komunikasi bisa berjalan dengan lebih baik saat pendataan berlangsung," katanya.

Jika Tim Penggerak PKK melihat ada keluarga di wilayah yang dianggap memenuhi syarat untuk diajukan menjadi

mampu memberikan penjelasan kepada warga mengenai kartu menuju sejahtera (KMS).

"Warga perlu mengetahui bahwa KMS adalah identitas penduduk miskin kota. Kartu ini tidak diminta, tetapi diberikan kepada warga yang memenuhi parameter pendataan," katanya.

Pada pendataan tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta belum akan mengubah parameter pendataan calon penerima KMS. Pendataan tahun ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan penerima KMS 2017. Saat ini, total penerima KMS tahun ini tercatat sebanyak 18.730 kepala keluarga (KK) atau 60.195 jiwa. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. TP. PKK/ Dekranasda			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005